

Tinjauan Penerapan Konsep Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Manggarai Barat)

Roseven Rudiyanto* ¹⁾, Elisabeth Klara Sekar Cahyani ²⁾, Kusnanto ³⁾, Marius Yosef Seran ⁴⁾, Joana Viviani ⁵⁾

Politeknik eLBajo Commodus ^{1,4)}

Yayasan WWF Indonesia ^{2,3,5)}

Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat

Roseven@poltekelbajo.ac.id

Abstrak

Labuan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas memiliki orientasi pada pariwisata keberlanjutan sebagai konsep pengembangan. Pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan membutuhkan pemantauan secara menyeluruh. Salah satu standar dan pedoman yang dapat digunakan sebagai pemantauan penerapan pariwisata berkelanjutan pada suatu wilayah ialah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang telah didasari Standar Pariwisata Berkelanjutan kriteria destinasi dari GSTC. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para berbagai pihak dalam meningkatkan penerapan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini menggunakan metode *mix method exploratory design procedures*. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan kemudian dianalisis menggunakan skala penilaian 1 hingga 4. Analisis data difokuskan aspek yang diformulasikan dalam Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yaitu 1) Pengelolaan Berkelanjutan, 2) Keberlanjutan Sosial Ekonomi, 3) Keberlanjutan Budaya, dan 4) Keberlanjutan Lingkungan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi aksi nyata dalam mewujudkan destinasi wisata berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat. Penerapan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat telah mencakup keempat aspek Pedoman Pariwisata Berkelanjutan. Upaya yang dapat diterapkan pemenuhan indikator Pedoman Pariwisata Berkelanjutan ialah optimalisasi sistem pendataan yang terintegrasi dan terpusat sebagai inventarisasi dokumentasi pelaksanaan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.

Keyword : Implementasi, Destinasi, Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata Indonesia.

Review of the Implementation of the Sustainable Tourism Destination Concept (Case Study: West Manggarai Regency)

Abstract

Labuan Bajo, situated in West Manggarai Regency, has been designated as a super-priority tourism destination with sustainable tourism as its core development concept. Effective management of such destinations requires comprehensive monitoring. The Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 9 of 2021 on Sustainable Tourism Destination Guidelines—based on the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Destination Criteria—serves as a key instrument for evaluating implementation. This study aims to describe the application of sustainable tourism principles in West Manggarai Regency and to provide a foundation for stakeholders in strengthening sustainability practices. Employing a mixed-method exploratory design, data were collected through interviews and analyzed using a four-point rating scale. The analysis focused on four dimensions outlined in the Guidelines: (1) Sustainable Management, (2) Socio-Economic Sustainability, (3) Cultural Sustainability, and (4) Environmental Sustainability. Findings reveal that the Guidelines established by the Ministry of Tourism and Creative Economy can function as a monitoring and evaluation tool for concrete actions toward sustainable destination development. The implementation in West Manggarai Regency has encompassed all four dimensions. To enhance compliance with the indicators, the study recommends optimizing an integrated and centralized data management system to serve as an inventory and

documentation mechanism for sustainable tourism practices. This research contributes to both academic discourse and practical policymaking by demonstrating how national guidelines, aligned with international standards, can be operationalized to advance sustainable tourism in priority destinations.

Kata kunci: Implementation, Destinations, Sustainable Tourism, Indonesian Ministry of Tourism.

PENDAHULUAN

Kepariwisataan merupakan industri yang dinamis dan berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan kepariwisataan berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan. Salah satu konsep pariwisata yang berkembang saat ini ialah pariwisata berkelanjutan. Terminologi pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism pertama kali disampaikan pada tahun 1993 oleh Bramwell and Lance (Yoopetch & Nimsai, 2019). Menurut Bramwell & Lane (1993) pariwisata berkelanjutan dapat dilihat sebagai pendekatan positif untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari interaksi antara komponen destinasi wisata, termasuk industri pariwisata, wisatawan/pengunjung, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. Organisasi kepariwisataan dunia, United Nation World Tourism Organization (UNWTO) menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak bisa dilihat sebagai sebuah bentuk pariwisata, namun semua pariwisata harus diupayakan untuk lebih berkelanjutan (Wagenseil dkk., 2022). Linnes (2022) berpendapat bahwa pariwisata berkelanjutan ialah konsep yang berfokus kepada titik seimbang antara tiga aspek, yaitu alam, sosial budaya, dan ekonomi, sehingga pengunjung dapat menikmati sumber daya alam pada sebuah destinasi wisata dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan manfaat finansial bagi penduduk tuan rumah.

Salah satu standar yang digunakan sebagai instrumen pemantauan penerapan pariwisata berkelanjutan secara global ialah Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Bricker & Schultz (2011) menjelaskan bahwa GSTC didirikan untuk sebagai upaya global untuk mengatasi perbedaan persepsi mengenai pariwisata berkelanjutan dan untuk menemukan titik temu dalam mengukur efektivitas penerapan pariwisata berkelanjutan. Bushell & Bricker, (2017) menjelaskan bahwa GSTC menyatukan berbagai berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi yang berkelanjutan, termasuk swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, individu dan komunitas untuk terlibat dalam mewujudkan praktik terbaik penerapan pariwisata berkelanjutan.

Kepariwisataan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang berpusat pada nilai-nilai keberlanjutan. Standar pariwisata berkelanjutan yang diformulasikan oleh GSTC diadaptasi oleh Kementerian Pariwisata Indonesia pada tahun 2016 (Global Sustainable Tourism Council, 2016). Kementerian Pariwisata Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagai landasan dalam pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, GSTC juga memperbaharui standar Kriteria Destinasi GSTC pada tahun 2019. Perubahan standar tersebut diadopsi kembali oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Kabupaten Manggarai Barat dengan Labuan Bajonya telah menjadi salah satu destinasi yang paling berkembang di Indonesia. Perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat dari penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata prioritas. Status destinasi prioritas mendorong pertumbuhan infrastruktur dan industri di sektor pariwisata.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat juga dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan yang meningkat pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah wisatawan yang menginap di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 mencapai 259.574 jiwa, dimana pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang menginap ialah 142.965 (BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023).

Pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat memberikan perhatian kepada konsep pariwisata berkelanjutan. Hal ini direfleksikan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2025 bahwa visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat ialah terwujudnya Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan prinsip ekowisata berbasis masyarakat. Terlebih, konsep pengembangan

Labuan Bajo ialah pariwisata yang berkelanjutan (Alyanti et al., 2022).

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat yang berorientasi pada konsep berkelanjutan memerlukan tindakan monitoring, sehingga pengembangan yang berlangsung sesuai dengan nilai-nilai berkelanjutan. Terlebih, kajian tentang penerapan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, dan menyusun rekomendasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan merupakan regulasi yang diformulasikan dengan tujuan memberikan pedoman secara menyeluruh tentang pengelolaan destinasi wisata dengan nilai-nilai keberlanjutan, sehingga dapat mewujudkan aspek pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan untuk mewujudkan pariwisata yang kelanjutan (Kementerian Pariwisata Indonesia, 2021). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa struktur Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan tersebut terdiri dari empat bagian, yaitu 1) pengelolaan berkelanjutan, 2) Keberlanjutan sosial ekonomi, 3) keberlanjutan budaya, dan 4) keberlanjutan lingkungan. Adapun indikator pada Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mencapai 175 indikator.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode mix method exploratory design procedures. Metode mix method exploratory design procedures merupakan metode penelitian yang terdiri dari beberapa tahap. Ivankova dkk. (2006) menjelaskan bahwa langkah pertama pada mix method exploratory design procedures ialah pengumpulan data kualitatif yang diikuti proses validasi dengan skala yang dikembangkan secara kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara melalui focus group discussion, studi pustaka, dan

observasi. Selain itu, teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi data. Adapun proses pengumpulan data dilakukan dari bulan Maret 2023 hingga bulan September 2023.

Data yang terkumpul dianalisis dengan penilaian skala 1 hingga 4. Teknik ini diadaptasi dari Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) untuk menilai desa wisata. Adapun penjelasan skor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Skala	Kriteria	Keterangan
1	Tidak Terpenuhi	Tidak memiliki indikator yang dibutuhkan
2	Kurang Terpenuhi	Indikator yang dibutuhkan masih berupa rencana, belum ada pelaksanaannya
3	Sebagian Terpenuhi	Indikator yang dibutuhkan terlaksana, namun tidak terdokumentasi
4	Terpenuhi Sepenuhnya	Indikator yang dibutuhkan terlaksana dan terdokumentasi

Sumber: Indonesia Sustainable Tourism Council

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan empat aspek pedoman destinasi pariwisata yang berkelanjutan, antara lain 1) pengelolaan berkelanjutan; 2) keberlanjutan sosial dan ekonomi; 3) keberlanjutan budaya; dan 4) keberlanjutan lingkungan.

Pengelolaan Yang Berkelanjutan

Bagian Pengelolaan Yang Berkelanjutan terdiri dari sebelas 11 kriteria, yaitu 1) Tanggung jawab pengelolaan destinasi, 2) Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi, 3) Monitoring dan pelaporan, 4) Pelibatan badan usaha dan standar keberlanjutan, 5) Pelibatan dan umpan-balik dari penduduk setempat, 6) Pelibatan dan umpan-balik dari pengunjung, 7) Promosi dan Informasi, 8) Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung, 9) Perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan, 10) Adaptasi Perubahan Iklim, dan 11) Pengelolaan risiko dan krisis. Selain itu, 11 kriteria tersebut terdiri dari 52 indikator. Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul, sebanyak 58% indikator mendapat kategori penilaian terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya 23% indikator mendapatkan kategori penilaian sebagian terpenuhi, 15% indikator – kurang terpenuhi, dan 4% mendapatkan kategori penilaian tidak terpenuhi.

Pemenuhan aspek pengelolaan yang berkelanjutan berdasarkan standar GSTC destinasi didasari oleh kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh seluruh pihak yang dapat berkontribusi pada pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu bentuk dari pemenuhan indikator dalam bagian Pengelolaan Yang Berkelanjutan ialah pembentukan Tim Kerja Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 04/KEP/HK/2022. Selain itu, tim kerja daerah tersebut memiliki tugas seperti, 1) sosialisasi standar keberlanjutan destinasi dan penerapannya, 2) pemberian masukan terhadap penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Yang Terintegrasi / Integrated Tourism Master Plan (ITMP); 3) melaksanakan penilaian mandiri sesuai standar pariwisata berkelanjutan sesuai Permenpar No. 9 Tahun 2021; 4) memfasilitasi kajian Strategic Visitor Flow (SVF); 5) pertemuan berkala; 6) membangun kerja sama dengan perguruan tinggi / akademisi terkait pengelolaan kepariwisataan terintegrasi dan berkelanjutan, dan 7) memberikan masukan terhadap penyusunan RIPPARDA sesuai ITMP.

Pemenuhan indikator bagian Pengelolaan Yang Berkelanjutan ini juga didasari oleh eksistensi dokumen regulasi yang telah ditetapkan, seperti RIPPARDA Kabupaten Manggarai Barat 2014 – 2025 yang mencakup rencana pembangunan kepariwisataan dengan nilai-nilai berkelanjutan. Selain itu, Rencana Induk Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2021 – 2026 telah memasukan unsur korelasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga telah memformulasikan regulasi terkait penyewaan dan operasional properti untuk kegiatan pariwisata, yakni Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan kajian yang dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat juga menjadi dasar pemenuhan indikator bagian Pengelolaan Yang Berkelanjutan, seperti 1) exit survey Kabupaten Manggarai Barat untuk mengetahui tingkat kepuasan wisatawan terhadap Kabupaten Manggarai Barat, 2) kajian strategic visitor flow yang terkait penyebaran wisatawan, dan 3) Kajian Cadangan Karbon (C-stock) Bentang Alam Mbeliling (BAM). Selain itu, penyelenggaraan penganugerahan Lingko Award sebagai langkah untuk meningkatkan dan sekaligus mengapresiasi kesadaran pelaku pariwisata, khususnya industri perhotelan juga memenuhi indikator dalam bagian Pengelolaan

Yang Berkelanjutan. Terlebih, para pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat juga melakukan kegiatan lainnya, seperti ketersediaan SOP pelaksanaan kegiatan pariwisata di Kawasan Taman Nasional Komodo, sosialisasi mitigasi bencana juga telah dilakukan, seperti FGD Tata Cara Menghadapi Bencana Alam Di Kabupaten Manggarai Barat, pemasangan titik kumpul dan jalur evakuasi, dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata, seperti kepemanduan dan barista.

Upaya promosi juga menjadi pemenuhan Indikator pada bagian Pengelolaan Yang Berkelanjutan. Atraksi wisata yang tersedia di Kabupaten Manggarai Barat telah dipromosikan secara digital melalui Instagram, Facebook, dan juga situs resmi para pemangku kepentingan, seperti situs Pemerintah Manggarai Barat, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), dan Balai Taman Nasional Komodo. Selain itu, terdapat inovasi terkait promosi kepariwisataan dengan ketersediaan aplikasi Wisata Labuan Bajo yang tersedia di Google Playstore, dan Games (Gerakan Melek Sejarah) Labuan Bajo. Namun demikian, masih indikator yang belum terpenuhi pada aspek pengelolaan yang berkelanjutan, seperti menindaklanjuti umpan balik masyarakat, dan konsultasi bahan promosi. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata pada aspek pengelolaan yang berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat masih dapat ditingkatkan, terutama ketersediaan sistem dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan, dan diperlukan kegiatan terkait umpan balik tentang perkembangan pariwisata dari masyarakat setempat.

Keberlanjutan Sosial Dan Ekonomi

Aspek Keberlanjutan Sosial Dan Ekonomi terdiri dari 8 kriteria, yaitu 1) Pengukuran kontribusi ekonomi pariwisata, 2) Peluang kerja dan karir, 3) Menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan, 4) Dukungan bagi masyarakat, 5) Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi, 6) Hak kepemilikan dan penggun, 7) Keselamatan dan keamanan, dan 8) Akses untuk semua. Selain itu, kriteria-kriteria tersebut terdiri dari 32 indikator. Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul, sebanyak 50% indikator mendapatkan penilaian terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya 38% indikator mendapatkan kategori penilaian sebagian terpenuhi, 6% indikator – kurang terpenuhi, dan 6% mendapatkan kategori penilaian tidak terpenuhi.

Pemenuhan indikator dalam bagian Keberlanjutan Sosial Dan Ekonomi didasari adanya dokumen hasil pengukuran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2021. Selain itu, kajian exit survey juga dapat menjadi pemenuhan indikator pada bagian Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi. Hal ini didasari bahwa kajian tersebut telah mencakup total belanja wisatawan selama berwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Terlebih, adanya kebijakan dan kegiatan terkait ketenagakerjaan yang menjadi pemenuhan indikator pada aspek keberlanjutan sosial ekonomi, seperti 1) penyelenggaraan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bidang kepariwisataan di Labuan Bajo yang juga melibatkan perempuan dan disabilitas, 2) penyerapan peserta pelatihan kepariwisataan di industri pariwisata, seperti hotel, 3) mekanisme untuk menerima atau menangani keluhan terkait permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan, dan 4) regulasi terkait pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adanya kegiatan terkait pengembangan UMKM juga menjadi pemenuhan indikator pada bagian ini, seperti pelaksanaan pameran UMKM di pusat-pusat pariwisata dan tersediannya konten promosi produk UMKM khas Kabupaten Manggarai Barat pada aplikasi Wisata Labuan Bajo.

Namun demikian, pemenuhan aspek sosial ekonomi masih dapat ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, seperti pelaksanaan pertemuan bisnis atau business matching antara produsen dan konsumen yang dapat mendorong terjadinya kesepakatan antara petani, pelaku umkm, dan penyedia produk lainnya dengan badan usaha pariwisata agar terciptanya sinkronisasi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan distribusi manfaat langsung kepada masyarakat yang dihasilkan dari perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, diperlukan juga mekanisme untuk menghubungkan dan memfasilitasi pengunjung dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan konsep pariwisata keberlanjutan. Hal ini bertujuan agar terjadi interaksi masyarakat dengan pengunjung dalam kegiatan praktik pelestarian lingkungan.

Keberlanjutan Budaya

Bagian Keberlanjutan Budaya terdiri dari tujuh kriteria, yaitu 1) Perlindungan aset budaya, 2) Artefak budaya, 3) Warisan tak-benda, 4) Akses tradisional, 5) Hak kekayaan intelektual, 6) Pengelolaan pengunjung pada situs budaya, dan 7) Interpretasi Situs. Selain

itu, kriteria-kriteria tersebut terdiri dari 26 indikator. Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul, sebanyak 38% indikator mendapatkan penilaian terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya 23% indikator mendapatkan kategori penilaian sebagian terpenuhi, 31% indikator – kurang terpenuhi, dan 8% mendapatkan kategori penilaian tidak terpenuhi.

Berdasarkan data yang berhasil terkumpul terdapat kegiatan yang menjadi pemenuhan indikator pada kriteria keberlanjutan budaya, antara lain: 1) penetapan cagar budaya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, 2) Peraturan Bupati No 63 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wisata Budaya Daerah, 3) penetapan petugas pemelihara cagar budaya/situs di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, 4) Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual, 5) Peraturan Bupati No 46 Tahun 2018 tentang Pramuwisata telah mencakup kewajiban pemandu wisata untuk menjaga dan menghormati adat istiadat, kearifan lokal, 6) terdapat inovasi promosi mengenai kekayaan budaya melalui aplikasi Wisata Labuan Bajo dan situs Gemes (Gerakan Melek Sejarah) Labuan Bajo.

Namun demikian, para pemangku kepentingan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat dapat melakukan sejumlah kegiatan untuk peningkatan pemenuhan indikator pada aspek budaya, seperti peningkatan narasi mengenai artefak atau situs budaya yang menjelaskan tingkat kerapuhan, dan juga mekanisme keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat sekitar artefak atau situs budaya dalam penyusunan narasi.

Keberlanjutan Lingkungan

Bagian Keberlanjutan Lingkungan memiliki 12 kriteria, yaitu 1) Perlindungan lingkungan sensitif, 2) Pengelolaan pengunjung pada situs alam, 3) Interaksi dengan kehidupan liar, 4) Eksploitasi spesies dan kesejahteraan satwa, 5) Konservasi energi, 6) Penatalayanan air, 7) Kualitas air, 8) Air limbah, 9) Limbah padat, 10) Emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim, 11) Transportasi berdampak rendah, dan 12) Pencemaran cahaya dan kebisingan. Bagian keberlanjutan budaya terdiri dari 65 indikator. Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul, sebanyak 29% indikator mendapatkan penilaian terpenuhi sepenuhnya. Selanjutnya 15% indikator mendapatkan kategori penilaian

sebagian terpenuhi, 31% indikator – kurang terpenuhi, dan 15% mendapatkan kategori penilaian tidak terpenuhi.

Peningkatan pemenuhan indikator pada aspek keberlanjutan lingkungan didasari pelaksanaan kegiatan pelestarian oleh seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan antara lain penanaman pohon bakau sebagai program konservasi keanekaragaman hayati dan warisan alam, dan kegiatan pemantauan kehidupan liar di Kawasan Taman Nasional Komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo. Selain itu, pemenuhan indikator juga didasari oleh ketersediaan regulasi dan pelaksanaan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti 1) adanya sistem registrasi online sebagai salah satu upaya implementasi sistem carrying capacity di Taman Nasional Komodo, 2) sosialisasi mengenai aturan hewan yang dilindungi, 3) sosialisasi mengenai aturan dalam berwisata di Kawasan TNK, 4) tersedianya Perbup No 18 Tahun 2019 Tentang perlindungan keanekaragaman hayati Ikan Hiu dan Pari Manta sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Manggarai Barat, 5) penegakan hukum terhadap Tindakan pencemaran kualitas air, 6) program Lingko Award sebagai salah satu langkah yang bertujuan untuk menggalakan dan meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata terhadap pelestarian lingkungan, 7) ketersediaan tempat sampah di pusat-pusat kegiatan pariwisata, 8) tersediannya kode etik dalam industri pariwisata, seperti kode etik berwisata di Kawasan Taman Nasional Komodo, Perbup No 64 Tahun 2018 tentang Kepramuwisata, dan kode etik profesi pemandu wisata.

Namun demikian masih diperlukan kegiatan atau regulasi yang dapat diterapkan sebagai upaya pemenuhan indikator aspek keberlanjutan lingkungan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pemenuhan indikator aspek keberlanjutan dapat ditingkatkan terutama terkait Tindakan pencegahan penyebaran spesies asing invasif, pedoman atau himbauan mengenai gerakan hemat air, upaya penyebaran kualitas air minum setempat kepada pengunjung untuk mendorong pengurangan air minum dalam kemasan, perhitungan jejak karbon bagi kegiatan pariwisata oleh badan usaha, promosi penggunaan moda transportasi alternatif, pencemaran cahaya dan suara yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata.

PENUTUP

Penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata prioritas menjadi sebuah tantangan bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat yang menitikberatkan konsep berkelanjutan dibutuhkan instrumen pemantauan penerapan indikator pariwisata berkelanjutan. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 terkait Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mengadaptasi pembaharuan pada Standar Pariwisata Berkelanjutan kriteria destinasi yang dikeluarkan oleh Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi aksi nyata dalam mewujudkan destinasi wisata berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat. Implementasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat telah mencakup keempat aspek yang telah diformulasikan pada regulasi Pedoman Pariwisata Berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan kajian yang telah dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki tantangan. Salah satunya ialah ketersediaan data yang terdokumentasi sebagai pemenuhan indikator pada Pedoman Pariwisata Berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem pendataan yang terintegrasi dan terpusat, seperti Portal Satu Data Manggarai Barat sebagai inventarisasi dokumentasi terkait pelaksanaan pariwisata berkelanjutan, dan juga kajian yang bersifat pemantauan dapat dilakukan secara reguler sebagai langkah untuk pemantauan implementasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyanti, F., Kurniawati, Anggun YBB, J., & Moerthi, D. C. (2022, December 11). *Tujuh Arah Presiden dan Transformasi Labuan Bajo Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas*. <https://Setkab.Go.Id/Tujuh-Arahan-Presiden-Dan-Transformasi-Labuan-Bajo-Sebagai-Destinasipariwisata-Super-Prioritas/>.

- BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023*. <https://ntt.bps.go.id/publication/2023/02/28/b42d42d6480b55670ba67964/provinsi-nusa-tenggara-timur-dalam-angka-2023.html>
- Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.1080/09669589309450696>
- Bricker, K. S., & Schultz, J. (2011). Sustainable tourism in the usa: A comparative look at the global sustainable tourism criteria. *Tourism Recreation Research*, 36(3), 215–229. <https://doi.org/10.1080/02508281.2011.11081668>
- Bushell, R., & Bricker, K. (2017). Tourism in protected areas: Developing meaningful standards. *Tourism and Hospitality Research*, 17(1), 106–120. <https://doi.org/10.1177/1467358416636173>
- Global Sustainable Tourism Council. (2016, August 8). *Sustainable Tourism Destination Standard for Indonesia Achieves GSTC-Recognition*. [Www.Gstcouncil.Org](http://www.gstcouncil.org).
- Ivankova, N. V., Creswell, J. W., & Stick, S. L. (2006). Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice. *Field Methods*, 18(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/1525822X05282260>
- Kementerian Pariwisata Indonesia. (n.d.). Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. In 2021. Retrieved March 13, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203906/permenpar-no-9-tahun-2021>
- Linnes, C., Agrusa, J., Ronzoni, G., & Lema, J. (2022). What Tourists Want, a Sustainable Paradise. *Tourism and Hospitality*, 3(1), 164–183. <https://doi.org/10.3390/tourhosp3010013>
- Wagenseil, U., Wyss, M., & Huck, L. (2022). The Case of Sustainable Tourism Development in Alpine Destinations: Importance, Implementation, and the Role of the Local DMO. *Tourism Planning and Development*. <https://doi.org/10.1080/21568316.2022.2107561>
- Yoopetch, C., & Nimsai, S. (2019). Science mapping the knowledge base on sustainable tourism development, 1990–2018. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 13). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su11133631>